



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 JAKARTA 10110 TROMOL POS NOMOR 1020 TELP
(021) 3843348.3810350.3457661 FAKSIMILE 3810361

Nomor : **B-196** /Bua.3/KU.00/10/2017 **3** Oktober 2017
Sifat : Penting
Lampiran : Satu set
Hal : Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III
Komprehensif Tahun 2017

Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia selaku Penanggungjawab Koordinator Wilayah DIPA 005.01, 005.03, 005.04, dan 005.05

Sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-8533/PB/2017 tanggal 29 September 2017 Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Triwulan III Komprehensif Tahun 2016/7 (surat terlampir), bersama ini diminta kepada Saudara untuk menyusun Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 berdasarkan data Aplikasi e-Rekon&LK dan berpedoman pada PMK Nomor 222/PMK.03/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, terdiri dari :

- a. Pernyataan Tanggung Jawab
- b. Ringkasan Laporan Keuangan
- c. Laporan Realisasi Anggaran
- d. Neraca
- e. Laporan Operasional
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tingkat Eselon I disampaikan Kepada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi paling lambat tanggal 25 Oktober 2017 melalui email biro_keuangan_mari@yahoo.co.id dan bagian.akuntansi.ma@gmail.com. Sedangkan Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah disampaikan ke Unit Eselon I masing-masing (Lihat jadwal penyusunan dan penyampaian LKKL pada Lampiran III surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-8533/PB/2017 tanggal 29 September 2017).

Demikian disampaikan. atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,



Sutisna S.Sos, M.Pd
NIP.195811271984031001

Tembusan :

1. Ketua Kamar Pembinaan Sekretaris Mahkamah Agung RI,
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203, 5204 FAKSIMILE (021) 3846402
WEBSITE: www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 8533 /PB/2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Penyusunan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017

29 September 2017

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil
Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga (Lampiran I)
Jakarta


Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada LKKL Semester I Tahun 2017 masih terdapat berbagai permasalahan antara lain kesalahan penggunaan akun, selisih nilai yang signifikan antara transfer masuk dan transfer keluar Barang Milik Negara yang tidak dapat ditelusuri, penjelasan yang kurang memadai atas transaksi antar entitas, hibah, persediaan dan penyisihan piutang.
2. Atas permasalahan tersebut, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) perlu mengidentifikasi penyebab permasalahan dan mencari solusi terbaik serta mencegah terulangnya permasalahan tersebut dalam LKKL Tahun 2017 (hasil telaah tiap Kementerian Negara/Lembaga disajikan pada lampiran II).
3. Sehubungan dengan angka 1 tersebut di atas, seluruh Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk menyusun LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan paling lambat tanggal **31 Oktober 2017**. Proses rekonsiliasi eksternal dan unggah data dalam rangka penyusunan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 dapat dilaksanakan mulai tanggal 6 s.d. 30 Oktober 2017 melalui aplikasi e-Rekon&LK pada situs www.e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id. Mekanisme dan proses penyusunan disajikan dalam lampiran III.
4. LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 disusun dengan berpedoman pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, terdiri dari:
 - a. Pernyataan Telah Direviu

- b. Pernyataan Tanggung Jawab
- c. Ringkasan Laporan Keuangan
- d. Laporan Realisasi Anggaran
- e. Neraca
- f. Laporan Operasional
- g. Laporan Perubahan Ekuitas
- h. Catatan atas Laporan Keuangan

5. Selain itu, Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai satker Badan Layanan Umum agar memedomani mekanisme dan petunjuk teknis mengenai prosedur eliminasi Pendapatan BLU dari entitas Pemerintah Pusat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Tingkat K/L (lampiran IV). Dengan demikian, eliminasi transaksi BLU dalam proses konsolidasi LK BLU dengan LKKL dapat berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryo
NIP. 195906061983121001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- 2. Inspektur Jenderal/Inspektur seluruh Kementerian Negara/Lembaga
- 3. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia;
- 4. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia;
- 5. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia;
- 6. Para Kepala KPKNL seluruh Indonesia.

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/KEPALAWAKIL
KEPALA/DIREKTUR UMUM KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/DeputiKementerian Negara/Lembaga
1.	Sekretaris Jenderal MPR RI
2.	Sekretaris Jenderal DPR RI
3.	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Sekretaris Jenderal BPK RI
5.	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6.	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
7.	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
8.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
9.	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
12.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
13.	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
15.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
16.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
17.	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
19.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
20.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
21.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
22.	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
24.	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
31.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata RI
32.	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
34.	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
35.	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
38.	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
39.	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
40.	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
41.	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
44.	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
46.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
50.	Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
55.	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
61.	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
62.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
64.	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
65.	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
66.	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
68.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72.	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
74.	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77.	Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Anggota I Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Deputi Administrasi Sekretaris Kabinet
81.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
82.	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86.	Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif